

## **Ketika Kebhinekaan Dicederai dengan Tindakan Anarkis**

*Oleh :*

*Safitri Yosita Ratri*

### **I. Insiden Monas**

Hari Minggu tanggal 1 Juni 2008 yang lalu masyarakat Indonesia gempar akibat gencarnya berita dari seluruh media massa, terutama semua media televisi Indonesia, yang mengatakan Front Pembela Islam (FPI) telah melakukan tindak kekerasan terhadap para anggota Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB). Hari itu, ketika bangsa Indonesia semestinya merenungkan kembali makna kelahiran Pancasila, justru di waktu itulah terjadi peristiwa yang menoreh luka bagi Ibu Pertiwi. Lapisan masyarakat yang tergabung dalam AKKBB yang sedang memperingati Hari Pancasila dan 100 Tahun Kebangkitan Indonesia di Lapangan Monumes Nasional (Monas) tiba-tiba di serang oleh segerombolan pasukan laskar islam atas nama Front Pembela Islam. Aksi kekerasan itu mengakibatkan massa AKKBB bubar. Pada saat yang sama Front Perjuangan Rakyat dan Hizbut Tahrir Indonesia berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, menuntut agar keputusan kenaikan harga bahan bakar minyak dibatalkan.

Dari tayangan televisi, terlihat pasukan FPI membubarkan dengan cara paksa, memukul, dan menyerang siapapun yang ada di sana, bahkan beberapa korbannya adalah wanita. Sungguh kerusuhan ini telah memberi luka tidak hanya pada masyarakat kita yang mendambakan perdamaian dan persatuan dalam kebhinekaan, namun juga harga diri bangsa Indonesia di mata dunia, yang akan tercatat sebagai bangsa yang tidak sadar hukum dengan menyelesaikan masalah hanya dengan kekerasan.

Diambil dari berita [www.detik.com](http://www.detik.com), menurut versi AKKBB, pasukan FPI tiba-tiba datang menyerang. Saat kejadian, massa AKKBB baru saja duduk-duduk di pelataran Monas. Mereka masih menunggu acara aksi damai dimulai. Namun tiba-tiba saja datang pasukan FPI dengan cara menyerbu dan menyerang bertubi-tubi sehingga massa AKKBB, yang kebanyakan perempuan dan anak-anak, tidak bisa berbuat apa-apa.

Sebaliknya diambil dari versi FPI, aksi AKKBB di kawasan Monas tersebut adalah aksi ilegal karena tanpa izin. Pada saat itu anggota laskar menyerang AKKBB karena diprovokasi sebab selama ini FPI tidak memiliki agenda untuk menyerang

siapapun. Di saat itu juga anggota FPI juga mengikuti aksi menentang kenaikan harga bahan bakar minyak dengan tertib. Ada juga yang ikut mendengarkan orasi pimpinan aksi yang selanjutnya bertakbir dan menyebut kalimat syahadat. Namun masalah mulai timbul saat aksi orasi semakin kuat, tidak jauh dari lokasi aktivis FPI. Para pemuda AKKBB meneriakkan dukungan keras-keras untuk Ahmadiyah. Setelah itu langsung massa FPI menjadi beringsang dan menghajar massa AKKBB.

Aksi kekerasan yang terjadi Minggu siang di Monas oleh FPI merupakan sebuah pencideraan terhadap kebhinekaan dan demokrasi yang sedang kita bangun. Bangsa Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang demokrasi semestinya akan senantiasa menjunjung tinggi pluralitas, perbedaan pendapat, dan penghargaan kepada hak-hak setiap warga negaranya. Namun apa yang terjadi di hari lahirnya Pancasila, justru menunjukkan mental bangsa kita yang tidak memiliki kepedulian akan persatuan dalam perbedaan, tidak menghargai perdamaian, dan tidak memiliki rasa belas kasihan terhadap sesama warga negara. Di hari yang seharusnya dijadikan sebagai momentum pemersatu seluruh komponen bangsa justru berubah menjadi aksi kekerasan yang menimbulkan konflik.

Dalam pandangan Islam, aksi kekerasan oleh FPI itu merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai Islam. Perbedaan pendapat yang timbul di masyarakat Indonesia hendaknya tidak dilakukan dengan cara main hakim sendiri. Setiap aksi kekerasan yang mengatasnamakan Islam hendaknya harus dihilangkan sesegera mungkin,. Hal ini disinyalir karena adanya pihak-pihak yang ingin mengadudomba umat Islam di negara Indonesia ini.

Lambatnya pemerintah dalam menyelesaikan kasus Ahmadiyah menjadi pangkal konflik sosial yang terjadi. Akan tetapi kekerasan yang dilakukan FPI harus dilihat sebagai reaksi atas ketidaktegasan pemerintah terhadap Ahmadiyah. Pemerintah dihimbau untuk segera mengambil keputusan tegas mengenai keberadaan aliran-aliran sesat di Indonesia seperti Ahmadiyah. Karena jika hal itu tidak dilakukan konflik sosial tidak mustahil akan terjadi lagi. Namun bukan berarti tindakan FPI dapat dibenarkan secara hukum. Bagaimanapun semua tindakan kriminal harus segera diselesaikan oleh aparat penegak hukum, apa pun jenisnya. Jika FPI dianggap telah melakukan tindakan kriminal secara fisik, maka Ahmadiyah telah melakukan kriminalisasi agama. FPI sala

karena menggunakan kekerasan dalam menyadarkan umat, sedangkan AKKBB lebih menyesatkan dengan membela Ahmadiyah.

Adanya tindakan provokasi dari kelompok-kelompok di luar Islam dengan mendukung eksistensi Ahmadiyahpun harus segera ditangani secara hukum. Apa yang mereka lakukan sesungguhnya merupakan upaya untuk menyulut emosi umat Islam. Para provokator ingin agar umat Islam terpancing untuk melakukan kekerasan.

Pemerintah Indonesia selama ini tidak pernah ada masalah dengan kebebasan beragama. Tiap-tiap agama mendapatkan hak-haknya untuk mengekspresikan keyakinannya. Namun harus dibedakan antara kebebasan beragama dan penistaan agama. Apa yang dilakukan oleh kelompok Ahmadiyah adalah dianggap sebagai penistaan agama, bukan kebebasan beragama. Negara tidak memiliki hak untuk mengatur ruang privat masyarakat dalam menentukan keyakinan beragamanya. Negara hanya perlu mengatur supaya ekspresi keyakinan dan kehidupan beragama masyarakat tidak melanggar hukum yang berlaku.

Dalam pandangan masyarakat umum, kekerasan berupa serangan itu salah dan harus ditindak sesuai dengan hukum. Namun secara psikologis, apa yang dilakukan oleh massa FPI itu harus bisa kita pahami dan dipikirkan bersama dengan jalan damai.

## **II. Faktor-faktor Penyebab Konflik**

Penyerangan FPI pada AKKBB dinilai sebagai buntut ketidakpastian pemerintah dalam menangani kasus Ahmadiyah. Oleh FPI, AKKBB dianggap sebagai pendukung gerakan Ahmadiyah, oleh karena itu perlu ditindak dan dilawan. Anggota AKKBB dihimpun dari beberapa tokoh Islam pendukung organisasi Nahdatul Ulama (NU), para ulama yang memiliki pondok pesantren, dan murid-murid pesantren. Masih berjalannya Ahmadiyah oleh pemerintah memicu keresahan karena surat keputusan bersama (SKB) soal Ahmadiyah terus diulur-ulur. Dengan lambannya keputusan presiden sebagai wakil pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi Bakorpakem yakni pembubaran Ahmadiyah, menimbulkan asumsi bahwa pemerintah dengan sengaja menciptakan kekisruhan sosial.

Dalam pandangan FPI, penyebab utama kasus Monas hanyalah menyangkut Ahmadiyah. Mereka menganggap bahwa masalah Ahmadiyah bukan hanya soal kebebasan beragama dan berkeyakinan, namun juga penodaan terhadap agama tertentu,

dalam hal ini adalah agama Islam. Pemerintah dinilai hanya dapat memberikan wacana dalam menanggapi kasus Ahmadiyah, daripada melakukan tindakan tegas yang preventif. Sikap pemerintah yang terkesan kapitalis-sekularis, terlihat dari ketidaktegasan Pemerintah dalam mengeluarkan SKB pelarangan Ahmadiyah yang ditentang keras oleh kaum liberal dan HAM, mengakibatkan terjadinya Insiden Monas.

Penyebab kerusuhan Monas ditanggapi oleh pakar Komunikasi Universitas Hasanuddin, Aswar Hasan (dalam website [www.jundula.wordpress.com](http://www.jundula.wordpress.com)), bahwa kerusuhan Monas merupakan efek dari “kekerasan simbolik” yang selama ini terjadi. Menurut Aswar, kekerasan simbolik adalah pemaksaan sistem simbolisme atau makna atas kelompok tertentu seakan-akan hal itu dianggap sebagai sesuatu yang sah dan benar. Menurut Aswar antara FPI dan AKKBB adalah dua titik ekstrem yang harus sama-sama dilihat secara fair dan jujur. Apa yang dilakukan FPI belum tentu sepenuhnya salah dan apa yang dilakukan AKKBB juga belum tentu sepenuhnya benar. Dalam berbagai kesempatan, yang ia perhatikan, misalnya, kelompok-kelompok liberal yang tergabung dalam AKKBB juga sangat demonstratif mempertontonkan aksi-aksi yang disampaikan melalui bahasa HAM dan demokrasi yang sepenuhnya didukung total media massa. Sementara yang lain tidak mendapatkan kesempatan. Aksi-aksi sporadis kalangan liberal di satu sisi, seperti melecehkan MUI merendahkan wibawa ulama, selalu mendapat tempat terhormat media massa dan televisi.

Sementara di sisi lain ada banyak pihak yang kecewa, diantaranya adalah bahwa selama ini pihak media tak memberikan tempat. Lebih-lebih negara justru tidak tegas dan kurang memberi perlindungan terhadap keyakinan mereka. Akar persoalan ini, menurut Azwar tak pernah dilihat secara adil dan fair. Terutama oleh media massa dan pemerintah. (dalam [www.jundula.wordpress.com](http://www.jundula.wordpress.com), Juni 2008).

Secara umum dapat dikatakan bahwa faktor-faktor penyebab timbulnya insiden Monas lebih diakibatkan adanya ketidakpuasan terutama dari pihak FPI yang menganggap pemerintah terkesan membiarkan kasus Ahmadiyah tanpa penyelesaian yang jelas, padahal ajaran Ahmadiyah telah merusak ajaran-ajaran Islam. Namun di lain pihak, penyebab timbulnya kerusuhan ini juga karena budaya kekerasan selama ini di negara kita yang sudah dianggap sebagai sesuatu yang sah dan benar.

### **III. Dampak-dampak yang Timbul**

Akibat peristiwa memalukan yang terjadi di Monas tersebut, aksi kekerasan terhadap FPI di sejumlah daerah mulai mencuat. Di Cirebon, plang nama FPI dihancurkan massa. Sementara, Markas FPI Yogyakarta juga nyaris dihancurkan kelompok warga. Sementara di Jakarta, lima ribu orang dari Garda Bangsa disiapkan untuk membubarkan FPI. Massa mengutuk tindakan FPI dan menuntut pembubaran semua FPI di berbagai daerah. Di Jember, Ketua FPI Jember Habib Abubakar tak ketinggalan ikut dikepung ratusan massa yang tergabung dalam Garda Bangsa dan simpatisan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Mereka menuntut FPI Jember dibubarkan. Tuntutan itu kemudian dipenuhi Habib Abubakar. FPI Jember membubarkan diri dengan dibacakannya pernyataan pembubaran oleh Habib Abu Bakar dihadapan massa Garda Bangsa di rumahnya di Jalan Kauman, Jember. Habib memberi tiga pernyataan yang ditandatangani di hadapan para wartawan, yaitu tentang permintaan maaf kepada masyarakat atas insiden Monas, permohonan maaf kepada KH. Abdurrahman Wahid atas sikap FPI selama ini, dan pernyataan pembubaran diri tanpa ada paksaan dari siapapun (Harian Kedaulatan Rakyat, Hari Rabu Pon, tanggal 4 Juni 2008).

Menurut Sigit Budi Darmawan (dalam blog [www.wordpress.com](http://www.wordpress.com), Juni 2008), jika hari-hari ini banyak tuntutan agar organisasi FPI dibubarkan, tidak lain adalah karena cara-cara kekerasan yang sering dilakukan oleh FPI dalam memaksakan tujuannya sangat bertentangan dengan hukum dan demokrasi. Menurutnya, jika FPI mampu merubah perjuangannya dengan cara-cara demokratis dan tidak melanggar hukum, kemungkinan masyarakat juga akan menentang tuntutan pembubaran FPI.

Dampak insiden Monas yang lainnya, adalah munculnya beberapa opini yang menyindir pemerintah. Sebab dengan adanya kasus ini, perhatian masyarakat lebih terfokus pada kasus kekerasan, dibandingkan dengan kasus BBM yang sedang hangat-hangatnya. Akibatnya kasus BBM menjadi tersamar, pemerintah tenang sebab masyarakat dan mahasiswa yang berdemo tidak lagi meributkan hal tersebut. Di ambil dari sumber website infokito, seorang pakar Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti menyatakan kekhawatiran insiden Monas justru menjadi politik pengalihan perhatian masyarakat, yang akan menguntungkan pemerintah. Menurutnya, jika sampai politik pengalihan tadi terbukti, mereka yang merencanakan hal itu dinilainya sebagai warga negara yang sangatlah tidak bermoral karena korbannya

adalah tetap masyarakat. Jika kebijakan dan standar pengamanan dijalankan, insiden di Monas tidak perlu terjadi.

Persatuan umat Islam yang ternodai jelas merupakan dampak yang menyertai pasca penyerangan FPI pada AKKBB di Monas tersebut. Tak ayal, caci maki antara tokoh agama Islam pun berbalas caci maki. Tudingan yang dilontarkan berbalas tuduhan. Kecam mengecam tak luput juga terjadi. Menghalalkan segala bentuk anarkis antara warga sesama muslim. Kekawatiranpun muncul, karena bisa jadi hal, caci maki dari para tokoh tersebut justru malah memprovokasi di tingkatan masyarakat simpatisan masing-masing. Seakan umat Islam sedang diadu domba, mengakibatkan potensi konflik horizontal yang semakin meluas.

#### **IV. Penyelesaian Konflik**

Pasca insiden Monas, Polri lalu menetapkan 10 tersangka tindakan kekerasan. Kesemuanya adalah anggota laskar FPI, termasuk Ketua FPI, Habib Rizieq Shihab dan bahkan Panglima Komando Laskar Islam, Munarman menjadi Daftar Pencarian Orang. Munarman akhirnya menyerahkan diri pada hari Senin tanggal 9 Juni 2008 bersamaan dengan turunya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri terkait Ahmadiyah. Secara Undang-Undang kewenangan Polri untuk menangkap sudah dijamin, khususnya dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI. Selain itu Indonesia juga sudah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan tentang Convention Against Torture. Dikatakan Ikrar Nusa Bhakti (Blog Infokito, Juni 2008), bahwa masalahnya tergantung pada cara bertindak aparat polisi di lapangan dalam menangkap orang-orang dalam kerumunan yang semrawut seperti kejadian kemarin itu. Jika persoalannya di Monas maka petunjuk pelaksanaan dan teknisnya harus diperbaiki dan aparat harus dilatih lebih baik lagi.

Menanggapi langkah yang dilakukan pemerintah tentang penangkapan 10 tersangka tersebut, DPR memberikan pujian. Dikutip dari Harian Kompas (Juni 2008), DPR menyatakan bahwa tindakan yang di ambil Presiden tentang penangkapan pelaku penyerangan merupakan langkah bagus meskipun agak terlambat. Presiden telah dinilai menegakkan hukum dan tidak takut dengan pelaku kekerasan dengan kedok agama. Pada tanggal 9 Juni 2008, Munarman menyerahkan diri, sedangkan Habib Rizieq sudah mendahului untuk diperiksa di Kepolisian.

Bersamaan dengan menyerahnya Munarman, pemerintah mengeluarkan SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah. SKB ini belum secara resmi membubarkan Ahmadiyah, namun melarang semua kegiatan Ahmadiyah dengan ancaman pelanggaran hukum karena penodaan agama. Inti dari SKB 3 menteri yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Jaksa Agung tersebut adalah pelarangan semua bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Ahmadiyah, dan larangan untuk tidak melakukan penodaan agama. Sebuah keputusan ini dinilai sebagai bentuk usaha mengakomodasi pihak-pihak yang bertikai tentang Ahmadiyah, namun tidak sejalan dengan semangat demokrasi yang menjunjung tinggi hak dan kebebasan warga dan memberikan perlindungan hukum secara adil bagi warganya.

Isi dari SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah sebagai berikut:

1. Memberi peringatan dan memerintahkan untuk semua warga negara untuk tidak menceritakan, menafsirkan suatu agama di Indonesia yang menyimpang sesuai UU No 1 PNPS 2005 tentang pencegahan penodaan agama.
2. Memberi peringatan dan memerintahkan bagi seluruh penganut, pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) sepanjang menganut agama Islam agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran agama Islam pada umumnya, seperti pengakuan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW.
3. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada anggota atau pengurus JAI yang tidak mengindahkan peringatan tersebut dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan.
4. Memberi peringatan dan memerintahkan semua warga negara menjaga dan memelihara kehidupan umat beragama dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum terhadap penganut JAI.
5. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah dapat dikenai sanksi sesuai perundangan yang berlaku.
6. Memerintahkan setiap pemerintah daerah agar melakukan pembinaan terhadap keputusan ini. (Harian Kedaulatan Rakyat, 9 Juni 2008).

Kekhawatiran kembali terjadi karena kemungkinan keputusan ini sifatnya gamang dan tidak tegas. Hal ini berpotensi untuk menambah konflik dan kecurigaan diantara berbagai pihak yang bertikai tentang Ahmadiyah. Bila negara harus berdiri diatas

konstitusi, dan memegang teguh pasal 29 UUD 45, negara harus memegang keyakinan adanya kebebasan berkeyakinan dan beragama. Negara harus segera menegaskan posisinya sebagai pelindung bagi warga negara dalam menjalankan hak-haknya tersebut.

## **V. Hikmah bagi Dunia Pendidikan**

Insiden Monas telah memberikan pelajaran khususnya bagi dunia pendidikan. Ada yang bernilai negatif, namun juga bernilai positif. Sisi negatif, tentunya insiden Monas memberikan pengaruh yang negatif. Adanya tayangan-tayangan yang menampilkan penyerangan kelompok FPI pada massa AKKBB dikhawatirkan akan ikut memberi pengaruh buruk bagi peserta didik. Apalagi mereka yang belum dapat secara logika memahami akan terjadinya konflik tersebut.

Akan tetapi bila melihat sisi baiknya, yaitu bahwa insiden di Monas antara FPI dengan massa AKKBB, memberikan sebuah pengetahuan akan tindakan yang menyimpang dari bentuk demokrasi, dari peristiwa itu terlihat nyata bahwa demokrasi di Indonesia telah disalahartikan. Momentum 1 Juni sebagai Hari Pancasila telah dinodai dengan tindakan anarkis. Bagi peserta didik, tentunya dengan melihat tayangan insiden Monas dapat menganalisis manakah sikap dan perilaku yang melanggar hukum, bagaimanakah bentuk demokrasi yang seharusnya, dan bagaimanakah penyelesaian konflik yang dilakukan pemerintah supaya konflik tidak meluas. Pengetahuan-pengetahuan tersebut berguna dalam rangka menciptakan pendidikan perdamaian di antara peserta didik pada khususnya.

## **VI. Kesimpulan**

Apa yang terjadi dalam Insiden Monas tidak bisa serta merta kita menyalahkan pihak yang menyerang yaitu FPI. Ditinjau dari sudut permasalahan dari AKKBB yang dengan berani memprovokasi para tokoh Islam untuk mendukung Ahmadiyah dan ditinjau dari FPI yang menyelesaikan masalah dengan jalan kekerasan merupakan dua hal yang sama-sama merugikan. Tidak ada satupun dari kedua belah pihak yang patut disalahkan, namun juga tidak ada satupun yang perlu didukung. Pemerintah seharusnya dapat menjadi penengah diantara keduanya, dengan memberikan penawaran solusi yang cepat dan tepat. Hal tersebut penting supaya permasalahan tidak berlarut-larut. Selayaknya pemerintah ikut bertanggung jawab dalam penyelesaian konflik dengan jalan damai



sehingga kerukunan antara sesama warga negara Indonesia pada umumnya dan umat muslim pada khususnya dapat tercapai.

Dalam dunia pendidikan, dapatlah kita mengambil pelajaran berharga akan penanganan konflik. Peserta didik akan belajar tentang demokrasi seperti apa yang seharusnya terjadi dan pengetahuan akan pendidikan perdamaian sebagai bekal masa depan dalam menghadapi konflik-konflik di luar lingkup pendidikan atau di lingkungan luar mereka.

## **VII. Alternatif Pemecahan Konflik**

Indonesia sebagai negara demokrasi harus menjunjung tinggi adanya perbedaan pendapat. Pemaksaan pendapat yang melalui kekerasan dan segala bentuk anarkhis harus disikapi dengan jalan hukum sebab hal tersebut melanggar esensi dari sebuah konsep demokrasi. Jika ingin membangun budaya demokrasi maka pemerintah juga harus mengoptimalkan ruang perdebatan publik yang bersifat mencerdaskan masyarakat. Adanya pendapat baik pro maupun kontra dapat disampaikan melalui berbagai sarana dan media publik. Hal ini yang akan mengajak masyarakat untuk mengetahui permasalahan secara lebih terbuka, jelas, dan rasional. Masing-masing kelompok mempunyai hak untuk menggiring opini masyarakat terhadap isu yang sedang berkembang melalui berbagai sarana demokrasi seperti partai, koran, atau televisi. Tindakan tersebut harus dilakukan dengan cara-cara yang lebih bermartabat, berbudaya, dan menghargai hak-hak sesama warga negara. Sebaliknya, upaya-upaya yang berlawanan dengan semangat demokrasi seperti itu berarti bertentangan dengan hukum, oleh karenanya harus ditindak oleh aparat penegak hukum. Selama ini konstitusi negara sebenarnya telah menjamin penuh akan semangat demokrasi rakyatnya. Menurut aturannya, setiap bentuk kekerasan akan ditindak tegas sesuai hukum yang ada. Alternatif yang perlu diupayakan dalam hal ini adalah adanya kesungguhan aparat dalam menegakkan hukum. Aparat kepolisian harus mencegah hal ini dan menyelesaikan kasus Monas secara hukum dengan memeriksa kedua belah pihak secara adil dan obyektif. Alternatif ini menjadi salah satu hal yang harus dibenahi oleh pihak aparat sehingga dapat menjadi pondasi yang kuat dalam membangun kehidupan demokrasi yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

Upaya yang perlu dilakukan juga dengan melibatkan pimpinan partai politik dan organisasi masyarakat Islam untuk segera mengambil inisiatif dalam rangka

menciptakan suasana perdamaian dan persatuan umat Islam. Tokoh-tokoh tersebut hendaknya mengimbau semua pihak tidak melakukan kekerasan terhadap FPI yang justru hanya akan memicu konflik yang lebih luas. Penyelesaian kasus Ahmadiyah lebih baik diserahkan pada pemerintah, semua pihak hendaknya memberi kesempatan kepada pemerintah dalam mengambil keputusan dan mencari cara penyelesaian yang terbaik.

Menindaklanjuti dengan SKB Menteri terkait Ahmadiyah, terkesan bahwa negara telah memberikan alasan legal kepada kaum radikal untuk melakukan pemberangusan dan perlawanan terhadap kelompok-kelompok yang mereka anggap “sesat” hanya karena mengajukan penafsiran yang berbeda dengan tafsiran. Bagaimana mungkin ini terjadi di negara kita yang mengaku sebagai negara Islam moderat dan berdasarkan Pancasila. Oleh karenanya pemerintah harus secara tegas memberlakukan Undang-Undang tentang ajaran yang dianggap melanggar hukum, namun tidak melarang umatnya untuk memeluk agama tertentu. Pemerintah juga dihimbau untuk segera menertibkan simbolisasi laskar-laskar. Hal ini dikarenakan akan memicu terjadinya bentrokan dilain waktu.

Media massa, seperti koran dan televisipun hendaknya dapat mengambil bagian sebagai pihak yang tidak membuat panas susana. Setidaknya, media massa juga jangan terlalu gegabah dalam menyampaikan berita baik tulisan atau pun foto apalagi yang tidak menyertakan keterangan yang mendiskripsikan foto tersebut. Para media massa semestinya dapat berpikir kembali ketika akan memajang sebuah berita foto. Tak hanya sekedar mengejar sensasi dan menyulut kemarahan bagi bangsa yang rentan akan provokasi ini sehingga etiked menyebarkan informasi tidak salah dipahami oleh pembaca.

Kerusuhan Monas hendaknya juga disikapi dengan jalan dialog, yang tidak mengarah pada sikap-sikap mempertajam konflik. Cara-cara anarkhis hanya akan membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terkurung pada tindakan saling menghancurkan dan bermusuhan. Ketegangan akibat konflik Monas hendaknya menyadarkan semua pihak untuk mulai memprakarsai dialog dengan mengedepankan persatuan dan perdamaian. Namun kenyataannya, suasana dialog di Indonesia saat ini seolah hilang, padahal bangsa Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai bangsa yang tidak menyukai perkelahian sesama warga negaranya. Oleh karena itu, sebaiknya tokoh-tokoh masyarakat dapat memprakarsai kembali adanya penyelesaian masalah dengan dialog ini

sehingga situasi konflik FPI dan AKKBB tidak dapat memicu konflik yang lebih panjang.

Siapapun yang bersalah dalam kasus Silang Monas tersebut, tanggal 1 Juni 2008, memang sudah seharusnya mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Selanjutnya semoga peristiwa seperti ini tidak terulang lagi, apalagi dengan menodai Hari Pancasila. Marilah kita bersama-sama membangun demokrasi secara sehat dan bermartabat dengan menghapus semua bentuk anarkhis yang hanya merusak keBhinekaan bangsa Indonesia!

### *Sumber Pustaka*

Kebhinekaan Dicederai, Setidaknya 12 Peserta AKKBB Terluka Akibat Aksi Kekerasan. (2 Juni 2008). *Harian Kompas*, p. 1.

FPI Jember Membubarkan Diri. (4 Juni 2008). *Harian Kedaulatan Rakyat*, p. 1.

Ketua FPI menjadi Tersangka. (5 Juni 2008). *Harian Kompas*, p. 1.

DPR Memuji Langkah Pemerintah. (5 Juni 2008). *Harian Kompas*, p.1.

Akhirnya Munarman Menyerahkan Diri, SKB Ahmadiyah Mengambang. (10 Juni 2008). *Harian Kedaulatan Rakyat*, p. 1.

Tim Penulis. *Pedoman Thesis dan Disertasi*. (2008). Yogyakarta: Pasca Sarjana UNY.

Siaran berita televisi selama bulan Juni 2008.

[www.detik.com](http://www.detik.com) yang direkam pada tanggal 13 Juni 2008.

[www.infokito.net](http://www.infokito.net) yang direkam pada tanggal 13 Juni 2008

[www.wordpress.com](http://www.wordpress.com) yang direkam pada tanggal 13 Juni 2008.

<http://jundula.wordpress.com/2008/06/03/rusuh-akkbb-fpi-kekerasan-simbolik-jauh-lebih-menyakitkan/> yang direkam pada 12 Jun 2008 04:47:41 GMT.